

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Tax Avoidance*

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [15].

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment system*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,

- a. Wajib pajak bersifat pasif,
- b. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus

2. *Self Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
- b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.

3. *With Holding Assignment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang, adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak [15].

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax Avoidance merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada pengurangan potensi penerimaan pajak. Praktik seperti ini dapat pula memberikan dampak sentimen negatif atas ketidakadilan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Di mana keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material wajib pajak. Kondisi yang berbeda akan diterapkam kebijakan yang berbeda. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan wajib pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Tingkat pemahaman atas peraturan perpajakan yang tinggi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dimanfaatkan untuk memberikan benefit langsung maupun tidak langsung bagi Wajib Pajak dalam meminimalisasi *Compliance Cost* yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kemampuan ini dinilai sebagai bentuk kinerja bagi manajemen perusahaan dimana beban terkait kepentingan membayar pajak akan menjadi berkurang. Manajer sebagai bagian dari pegawai akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik saham yaitu bertujuan meningkatkan penghasilan perusahaan [16].

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawfull*). Penghindaran pajak dapat

terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu [17] :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagi pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagi tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh strategi penangguhan pajak (misalnya, Penyusutan yang dipercepat untuk tujuan perpajakan) yang mungkin digunakan manajer untuk mengurangi pembayaran pajak tunai tahun berjalan. Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak di proksikan dengan *CETR*. *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) merupakan jumlah pajak yang dibayarkan secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak. *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) mencerminkan praktik fiskal yang mengurangi beban pajak efektif yang dibayarkan secara tunai. Ketika *CETR* naik maka penghindaran pajak turun begitu juga sebaliknya. [18].

Tarif efektif terjadi karena terdapat Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dan penggunaan tarif ini merupakan salah satu alasan untuk tidak menggunakan tarif majemuk [19].

Misalnya tarif efektif yang berlaku di Indonesia ditetapkan :

- a. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
 - b. Untuk penyerahan jasa biro pelayanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
 - c. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10 % dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya yang ditagih
- Rumus yang digunakan untuk menghitung *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut [18]:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Sales Growth

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang, penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan di lihat dari perbandingan penjualan tahun ini dengan penjualan tahun sebelumnya di bagi dengan penjualan tahun pertama. Dengan adanya penjualan yang stabil pada suatu perusahaan maka keuntungan yang diperoleh juga akan stabil atau meningkat. Pertumbuhan penjualan di lihat dari rasionya, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka perusahaan cenderung akan mendapat keuntungan yang besar. Rasio pertumbuhan penjualan menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dengan volume penjualan. Semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan penjualan tinggi [20]. Ada beberapa taktik penjualan yang bisa dirancang untuk mendobrak

volume penjualan dengan menggunakan lima pilar penetrasi dan pengembangan penjualan yang masih terbuka lebar, luas, dan dalam adalah sebagai berikut [21]:

- a. Produk atau jasa eksiting ke *market existing* atau penjualan produk yang ada kepada pelanggan yang eksiting.
- b. Produk *Re-design* ke *market existing*.
- c. Produk baru ke *market existing*.
- d. Produk *existing* ke *market* baru atau penjualan produk yang ada ke pasar yang baru.

Pertumbuhan penjualan yang tinggi atau stabil dapat berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan sehingga menjadi pertimbangan manajemen perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan. Besarnya penjualan menunjukkan sampai seberapa jauh produk perusahaan diterima oleh pelanggan. Semakin banyak penjualan berarti semakin banyak produk yang diterima oleh pelanggan. Sementara pertumbuhan penjualan (*sales growth*) perlu ditentukan karena prospek perusahaan merupakan fungsi dari tingkat penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan tinggi, berarti volume penjualan meningkat, sehingga perlu peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi baik untuk kebutuhan rutin serupa modal kerja atau penambahan aset tetap dalam perusahaan [22].

Keuntungan yang diperoleh apabila memiliki pelanggan besar dari perusahaan ternama. Selain volume penjualan yang meningkat, potensi *repeat order* dari *up* dan *cross selling*. Selain itu, ketika menjual kepada prospek potensial. Proses menjual akan lebih mudah karena pengaruh magnet daftar klien perusahaan yang terkenal. Keuntungan lain adalah memperkecil peluang pesaing tumbuh lebih cepat. Untuk memperkuat basis pertumbuhan penjualan, mencari pelanggan baru adalah hal yang sangat penting. Pertumbuhan penjualan tidak hanya tergantung pada *sales farming*, sangat penting mencari melalui pelanggan baru. Walaupun biaya operasional penjualan mencari dan memelihara pelanggan baru lebih mahal daripada mempertahankan yang ada. Selama pertumbuhan penjualan signifikan akan membuat *cost ratio* penjualan akan menjadi efisien dan rendah [21].

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana penjual menawarkan produk dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga

jual dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Pertumbuhan penjualan di lihat dari rasionya, semakin tinggi rasio pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka perusahaan cenderung akan mendapat keuntungan yang besar. Dengan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan juga akan berpengaruh pada besarnya cenderung akan melakukan upaya penekanan beban pajak yang akan mereka tanggung. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Sales Growth* adalah sebagai berikut [20]:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \quad (2.2)$$

2.1.3. Leverage

Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga diperlukan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya di dalam perusahaan baru selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam prakteknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan sumber dana ini tergantung dari tujuan, syarat-syarat, keuntungan, dan kemampuan tentunya. Sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman (bank atau lembaga keuangan lainnya) [12].

Keputusan untuk memilih menggunakan modal atau modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang. Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal

pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yakni [12].

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan total ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko

keuangan perusahaan. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas [12].

. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan standar 66% (2:3) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya dalam persoalan *Debt to Equity Ratio* (DER) perlu dipahami bahwa tidak ada batasan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang aman bagi suatu perusahaan, namun untuk konservatif biasanya *Debt to Equity Ratio* (DER) yang lewat 66% (2:3) sudah dianggap beresiko [23]. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Leverage* adalah sebagai berikut [12]:

$$DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}} \quad (2.3)$$

2.1.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rentabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik perusahaan ataupun manajemen perusahaan, tetapi juga bagi pihak yang ada diluar perusahaan, terutama bagi pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan [12].

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Hasil pengukuran profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen [12].

Return On Asset (ROA) adalah Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang

tertanam dalam total aset. Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi [12].

Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan lapotran laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset, secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung Profitabilitas adalah sebagai berikut [12]:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \quad (2.4)$$

2.1.5. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai

perusahaan yang likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak likuid. Untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang dapat diambil dari hasil rasio likuiditas, antara lain [12].

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar tanpa menghitung persediaan atau piutang. Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luar, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini

tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu. Namun, rasio likuiditas bukanlah satu-satunya cara atau syarat untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang secara kredit [12].

Current ratio (Rasio Lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan. Dalam praktiknya, sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% atau 2:1 yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya, dengan hasil rasio seperti ini perusahaan sudah berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis. Dari hasil pengukuran rasio, apabila *current ratio* rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut [12].

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \quad (2.5)$$

2.1.6. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan resiko usaha besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan [14].

Adapun menurut UU No 20 Tahun 2008 Pasal 1, bahwa ukuran perusahaan terbagi menjadi 4 kategori yaitu [24]:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomu di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut [24]:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguna tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
4. Usaha Besar
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah aktiva dari perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka

semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut [25]:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Asset}) \quad (2.6)$$

2.1.7. Kepemilikan Institutional

Kepemilikan Institutional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing. Kepemilikan institutional dapat diukur dengan total persentase kepemilikan institusi dalam perusahaan [26]. Adanya Kepemilikan Institutional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institutional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan [27].

Peran utama pemilik terkait pengembangan produk adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan produk yang tepat. Pemilik harus memastikan bahwa perusahaan terus memiliki ide baru untuk melakukan inovasi pengembangan produk agar perusahaan dapat bertahan, berkompetisi dan berkembang lebih baik. Dengan demikian, pemilik harus menjaga agar investasinya untung, tumbuh, dan lestari sehingga nantinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh para pemilik juga cukup tinggi [27].

Cakupan investor institutional berhubungan langsung dengan tingkat likuiditas saham tertentu di pasar modal. Jumlah saham yang beredar dan tersedia untuk perdagangan juga merupakan faktor utama. Karena popularitas dari sebuah perusahaan besar, maka menarik untuk dimiliki oleh investor institutional karena sahamnya lebih sering diperdagangkan sehingga membuatnya sangat likuid. Singkatnya, lebih banyak saham yang tersedia bagi investor untuk dibeli dan dijual, semakin harganya menjadi efisien untuk dimiliki. [28].

Kepemilikan institutional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institutional dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institutional maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan tindakan meminimalkan beban pajak oleh perusahaan dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak [10]. Rumus yang digunakan untuk menghitung Kepemilikan Institutional adalah sebagai berikut [27].

$$\text{Kepemilikan Institutional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.7)$$

2.2. Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap fakto-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian, antara lain:

1. Deanna Puspita & Meiriska Febrianti

Deanna Puspita & Meiriska Febrianti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian dilakukan periode 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 52 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, *sales growth* dan komposisi komisaris berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Secara parsial ukuran perusahaan dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage*, intensitas modal dan komposisi komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [4].

2. Nora Hilmia Primasari

Nora Hilmia Primasari (2019) melakukan penelitian dengan judul “*Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 92 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [5].

3. Moses Dicky Refa Saputra & Nur Fadrijh Asyik

Moses Dicky Refa Saputra & Nur Fadrijh Asyik (2017) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan indeks kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 44 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *leverage* dan *corporate governance* berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [6].

4. Wastam Wahtu Hidayat

Wastam Wahtu Hidayat (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 25 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [7].

5. Shinta Budianti & Khristina Curry

Shinta Budianti & Khristina Curry (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [9].

6. Yuliesti Rosalia

Yuliesti Rosalia (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 64 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan profitabilitas, likuiditas, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [8].

7. Nensi Yuniarti Zs, Elvis Nopriyanti Sherly, dan Dewi Nopita Sari

Nensi Yuniarti Zs, Elvis Nopriyanti Sherly, dan Dewi Nopita Sari (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institutional dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 29 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara simultan variabel kepemilikan institutional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial dan kepemilikan institusional dan dewan komuasaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* [10].

8. Muhamad Aprianto & Susi Dwimulyani

Muhamad Aprianto & Susi Dwimulyani (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institutional sebagai Variabel Moderasi”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 106 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *sales growth* dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional mampu mempengaruhi hubungan *sales growth* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Secara parsial *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Sedangkan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* dan mampu memperlemah pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* [11].

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Tabel 2. 1. Review Peneliti terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Yang diperoleh
Denna Puspita dan Meriska Febrianti (2017) [4]	Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014	<u>Variabel Dependen :</u> Penghindaran pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Ukuran Perusahaan b. <i>Return on Asset</i> c. <i>Leverage</i> d. Intensitas Modal e. <i>Sales Growth</i> f. Komposisi Komisaris Independen	<u>Secara Simultan :</u> Ukuran perusahaan, <i>Return on asset</i> , <i>Leverage</i> , Intensitas modal, <i>Sales growth</i> , dan Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran pajak <u>Secara Parsial:</u> a. Ukuran perusahaan dan <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak b. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak c. <i>Leverage</i> , Intensitas modal dan Komposisi Independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
Nora Hilmi Primasari (2019) [5]	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. <i>Leverage</i> b. Ukuran Perusahaan c. Profitabilitas d. Pertumbuhan Penjualan e. Proporsi Komisaris Independen f. Kualitas Audit	<u>Secara Simultan :</u> <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial :</u> a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Leverage</i> , Ukuran perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Yang diperoleh
Moses Dicky Refa Saputra dan Nur Fadrijh Asyik (2017) [6]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. <i>Corporate Governance</i>	Secara Simultan : Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Secara Parsial : a. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Wastam Wahyu Hidayat (2018) [7]	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen :</u> a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. Pertumbuhan Penjualan	Secara Simultan : Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Secara Parsial : a. Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak b. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2.1 Sambungan

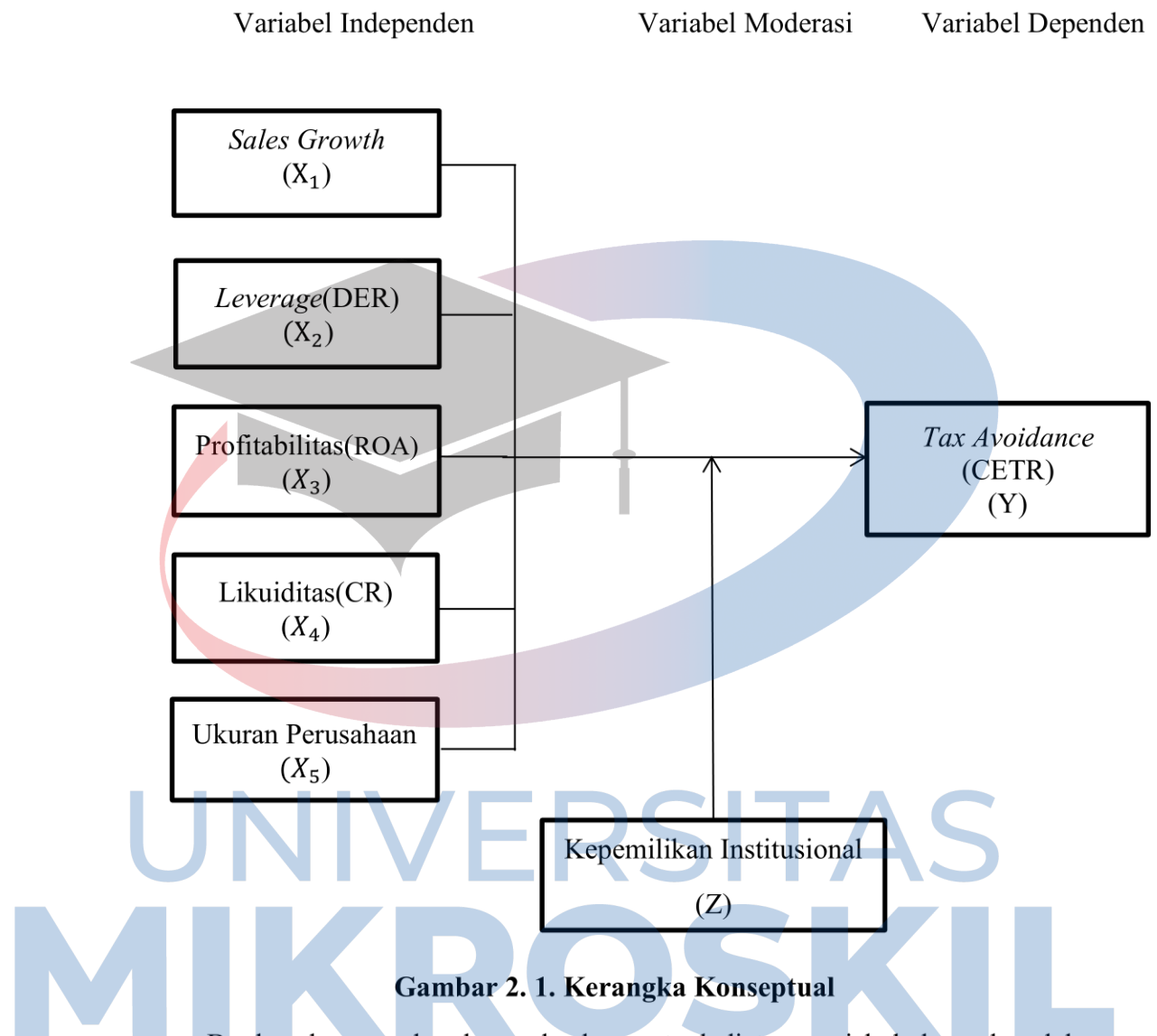
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Yang diperoleh
Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018) [9]	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. <i>Current Ratio</i> c. <i>Capital Intensity</i>	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Current Ratio</i> , dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial :</u> a. Likuiditas berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> b. Profitabilitas dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i>
Yuliesti Rosalia (2017) [8]	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> a. Profitabilitas b. Likuiditas c. Kepemilikan Institutional d. Komisaris Independen e. Kualitas Audit f. Komite Audit	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak b. Profitabilitas, Likuiditas dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2.1 Sambungan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Yang diperoleh
Nensi Yuniarti, Elvis Nopriyanti Sherly dan Dewi Nopita Sari [10]	Pengaruh Kepemilikan Institutional dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017	<u>Variabel Dependen :</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen :</u> a. Kepemilikan Institutional b. Dewan Komisaris Independen	<u>Secara Simultan :</u> Kepemilikan Institutional, dan Dewan Komisaris Independen, berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial:</u> a. Kepemilikan Institutional berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani (2019) [11]	Pengaruh <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institutional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2107	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> a. <i>Sales Growth</i> b. <i>Leverage</i> <u>Variabel Moderasi:</u> Kepemilikan Institutional	<u>Secara Simultan :</u> <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Parsial:</u> a. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> b. <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> c. Kepemilikan Institutional tidak mampu memoderasi pengaruh <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dan memperlemah <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.3. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual pada penelitian ini :



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Sales Growth*, *Leverage*, *Profitabilitas*, *Likuiditas* dan *Ukuran Perusahaan*. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Kepemilikan Institusional*.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales Growth sebagai indikator penting dari penerimaan pasar atas produk/jasa suatu perusahaan, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat akan membuat jumlah produksi dan laba perusahaan meningkat juga. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan dapat diartikan bahwa perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengalami kenaikan. Hal ini akan menyebabkan penghasilan kena pajak perusahaan semakin besar dan perusahaan cenderung akan melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [4]. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah :

H1a : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas atau *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi tingkat rasio *DER* dalam perusahaan menunjukkan komposisi total hutang semakin besar dibanding total modal sendiri, sehingga semakin besar beban dan perusahaan akan pasif melakukan *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* [6]. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1b : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan untuk melihat sejauh mana efektifnya kinerja manajemen perusahaan tersebut. Hal tersebut terlihat dari jumlah laba yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan dan jumlah pendapatan dari kegiatan investasi. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba dalam aktivitas operasional perusahaan menandakan perusahaan tersebut dapat mencapai efektivitas dalam perusahaannya. Apabila profitabilitas dalam perusahaan meningkat maka beban pajak yang dimiliki perusahaan juga akan meningkat sehingga perusahaan akan cenderung melakukan *Tax Avoidance*. Semakin tinggi tingkat rasio (*ROA*) dalam perusahaan tersebut artinya perusahaan mampu menghasilkan laba dari operasional perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [5]. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1c : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4. Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki *Current Ratio* kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset lancar yang sedikit untuk membayar kewajibannya. Jika aset lancar dalam perusahaan sedikit maka aktivitas operasional dalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga laba yang dihasilkan perusahaan sedikit dan membuat utang jangka pendek perusahaan semakin tinggi. Semakin besar utang jangka pendek dalam perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk membayar utangnya dengan aset yang dimilikinya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [9]. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1d : Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan total asset. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi laba dalam perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan melalui kinerja manajemen dalam meningkatkan laba perusahaan. Dengan meningkatnya laba dalam perusahaan maka beban pajak yang ditanggung akan besar sehingga mendorong perusahaan untuk menekan beban pajaknya dengan melakukan *Tax Avoidance* agar mencapai penghematan pajak yang optimal. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [4]. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1e :Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.6. Pengaruh Kepemilikan Institutional dalam Memoderasi Hubungan antara *Sales Growth, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institutional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Tingkat kepemilikan institutional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institutional. Kepemilikan Institutional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Dengan adanya Kepemilikan Institutional dalam perusahaan akan membuat pengawasan yang lebih besar pada aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar tingkat Kepemilikan Institutional pada perusahaan maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik sehingga mengurangi terjadinya indikasi perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institutional mampu memperkuat hubungan antara *Sales Growth, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan* terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kepemilikan Institutional berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* [10]. Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan bahwa Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* [11]. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan Institutional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan mampu memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen